

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 29 TAHUN 2010
(Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman)

Perpetua Saras Wulansuci
NIM : 132114062
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2017

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. LAKIP merupakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan sebagai salah satu perwujudan *good governance*.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan format pada LAKIP dan format pada peraturan

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian format LAKIP DPUP Kabupaten Sleman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Dari sepuluh unsur dalam peraturan, terdapat satu unsur yang belum dapat dipenuhi dan terdapat tiga unsur yang tidak sama dengan peraturan. Dapat disimpulkan LAKIP DPUP Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Kata kunci: LAKIP, *good governance*, akuntabilitas

ABSTRACT

ANALYSIS OF PERFORMANCE ACCOUNTABILITY REPORT OF
GOVERNMENT INSTITUTION BASED ON REGULATION OF STATE
MINISTER OF ADMINISTRATIVE REFORM AND BUREAUCRACY
REFORM NUMBER 29 YEAR 2010.

(A Case Study at Public Works and Housing Department of Sleman Regency)

Perpetua Saras Wulansuci

NIM: 132114062

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2017

The research aims to determine the consistency of Performance Accountability Report of Government Institution (LAKIP) of Public Works and Housing Department (DPUP) of Sleman based on Regulation of State Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform Number 29 Year 2010. LAKIP is the government's accountability for activities carried out within one budget year and as one of the realization of good governance.

This research is case study. The data was obtained by interview and documentation. Data analysis technique used was descriptive comparative by comparing the format on LAKIP and format on the regulation.

The result of this research showed an inconsistency of LAKIP DPUP of Sleman if compared with Regulation of State Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform Number 29 Year 2010. From ten elements in the regulation, there is one element that can not be fulfilled and there are three elements which is not in accordance with the regulation. It can be concluded that LAKIP DPUP of Sleman is not fully in accordance with the Regulation of State Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform Number 29 Year 2010

Keywords: LAKIP, good governance, accountability